E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Tata Kelola Ekowisata Mangrove Berbasis Komunitas Dalam Konsep Blue Economy (Studi Kasus Pada Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu Dalam Perspektif Islam)

Lidia Atika Septa Dela[1], Romi Adetio Setiawan[2], Syaifuddin[3]
[1]Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; @ lidiaatika136@gmail.com
[2]Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; @ romiadetio@mail.uinfasbengkulu.ac.id
[3]Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; @ syaifuddinbkl2017@gmail.com

Abstrak

Ekowisata mangrove merupakan bentuk pengelolaan sumber daya pesisir yang berorientasi pada konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola ekowisata mangrove berbasis komunitas dalam konsep Blue Economy di Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu serta implementasinya dalam perspektif Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ekowisata telah menerapkan prinsip Community-Based Tourism melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pengelolaan. Implementasi Blue Economy tercermin pada konservasi mangrove, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM. Dalam perspektif Islam, pengelolaan tersebut mencerminkan nilai amanah, musyawarah (syura), keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi tata kelola berbasis komunitas, prinsip Blue Economy, dan nilai-nilai Islam mampu mendukung pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: *Blue Economy; Ekowisata Mangrove; Community-Based Tourism; Tata Kelola; Perspektif Islam.*

Abstract

Mangrove ecotourism represents a form of coastal resource management oriented toward environmental conservation, community empowerment, and the enhancement of economic well-being. This study aims to analyze the governance of community-based mangrove ecotourism within the Blue Economy framework in the Kampung Nelayan Sejahtera (Prosperous Fishermen's Village) of Bengkulu City, as well as its implementation from an Islamic perspective. The study employs a qualitative method using a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with validity verified through triangulation. The results indicate that the ecotourism governance has applied Community-Based Tourism principles through community involvement in planning, implementation, evaluation, and the utilization of management outcomes. The implementation of the Blue Economy is reflected in mangrove conservation, sustainable resource utilization, community empowerment, and local economic growth driven by MSMEs. From an Islamic perspective, this management reflects the values of amanah (trustworthiness), musyawarah (consultation/shura), justice, responsibility, and kemaslahatan (public interest/well-being). The study affirms that integrating community-based governance, Blue Economy principles, and Islamic values can support environmental preservation while improving the welfare of coastal communities.

Keywords: *Blue Economy; Mangrove Ecotourism; Community-Based Tourism; Governance; Islamic Perspective.*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Corresponding Author:
Lidia Atika Septa Dela

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: lidiaatika136@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya krisis iklim, degradasi ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dalam konteks tersebut, perspektif Islamic Blue Economy yang berlandaskan Fiqh al-Bī'ah menjadi pendekatan penting dalam menganalisis tata kelola ekowisata yang berorientasi pada keberlanjutan. Konsep Islamic *Blue Economy* menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan berdasarkan prinsip syariah, yaitu menjaga kelestarian alam (*hifz al-bi'ah*), memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (*maslahah 'ammah*), serta menghindari *eksploitasi* yang merusak *ekosistem.* Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam mengelola alam sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga keseimbangannya. Hal ini mencakup penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam tata kelola ekowisata, distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pelestarian ekosistem mangrove sebagai penopang utama keberlanjutan ekowisata (Singgalen, 2020).

Di Indonesia juga terdapat beberapa daerah yang sedang mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan salah satunya yaitu Provinsi Lampung. Konsep pariwisata berkelanjutan yang dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang lama merupakan salah satu yang diacu oleh Provinsi Lampung. Salah satu wilayah yang pariwisatanya menerapkan konsep pariwisata keberlanjutan yaitu Kabupaten Pesawaran. Wilayah tersebut telah membangun perekonomian yang berkembang berbasis industri, pertanian, dan pariwisata secara berkelanjutan sehingga menjadi destinasi wisata unggulan dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Dari peraturan tersebut dapat diketahui pemerintah Kabupaten Pesawaran memfokuskan konsep pariwisata berkelanjutan sehingga memiliki dampak positif untuk diterapkan salah satu pendekatan untuk melaksanakan pariwisata berkelanjutan yaitu ekowisata. Ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Selain berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang laut, mangrove juga berperan sebagai habitat penting bagi berbagai jenis biota perairan serta memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon (*blue carbon*) yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, hutan mangrove tersebar luas di wilayah pesisir dan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Namun demikian, tekanan akibat aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, pembangunan kawasan pesisir, dan eksploitasi sumber daya, telah menyebabkan penurunan kualitas maupun luasan hutan mangrove. Oleh karena itu, pengembangan kawasan mangrove melalui pendekatan ekowisata menjadi salah satu alternatif pengelolaan yang mampu mengintegrasikan upaya konservasi lingkungan dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Kampung Nelayan Sejahtera di Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki kawasan mangrove dengan potensi untuk dikembangkan sebagai ekowisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Kelompok masyarakat lokal telah mulai berperan aktif dalam upaya konservasi mangrove dan pengelolaan kegiatan wisata, seperti pembangunan jalur tracking mangrove, penyediaan wisata edukasi lingkungan, serta pengembangan usaha kecil berbasis sumber daya pesisir. Inisiatif tersebut mencerminkan adanya upaya pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus potensi penerapan prinsip pengembangan ekowisata mangrove yang berorientasi pada konservasi ekosistem dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan ekowisata berkelanjutan, belum optimalnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah, serta kelembagaan lokal yang belum sepenuhnya kuat dalam mengelola ekowisata secara terencana dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengembangan ekowisata mangrove masih perlu diperkuat. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan terhadap ekosistem mangrove di wilayah pesisir akibat aktivitas manusia dan alih fungsi lahan, sementara mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan ekonomi masyarakat nelayan. Di Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu, pengembangan ekowisata mangrove berbasis komunitas telah mulai dilakukan sebagai upaya konservasi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya tata kelola pengelolaan ekowisata, minimnya bantuan dari pemerintah, sumber daya maanusia(SDM) yang rendah, keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta belum terintegrasinya aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Selain itu, konsep Blue Economy yang menekankan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan secara sistematis dalam pengelolaan ekowisata mangrove. Kajian yang mengintegrasikan konsep Blue Economy dengan perspektif Islam, yang menjunjung nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya alam, juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tata kelola ekowisata mangrove berbasis komunitas di Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu dalam kerangka Blue Economy dan perspektif Islam, guna menghasilkan rekomendasi pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai tata kelola ekowisata mangrove berbasis komunitas dalam konsep Blue Economy di Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu serta implementasinya dalam perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai proses pengelolaan ekowisata, keterlibatan masyarakat, penerapan prinsip Blu Economy, dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata, serta pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai tata kelola, partisipasi masyarakat, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pengelolaan ekowisata mangrove, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan teknik sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Tata Kelola Ekowisata Mangrove Berbasis Komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu telah menerapkan konsep Community-Based Tourism (CBT) atau ekowisata berbasis komunitas, yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pengelolaan kawasan wisata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan ekowisata. Pengelolaan dilakukan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi lembaga utama dalam mengoordinasikan seluruh aktivitas pengembangan kawasan wisata mangrove. Keberadaan Pokdarwis berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keberlanjutan kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, perencanaan pengelolaan ekowisata dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pengurus Pokdarwis dan masyarakat sekitar. Musyawarah tersebut membahas berbagai program kerja, seperti kegiatan penanaman mangrove, pemeliharaan jalur tracking, kebersihan kawasan wisata, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengembangan usaha masyarakat di sekitar kawasan ekowisata. Setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan ikut menentukan arah pengelolaan ekowisata sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pokdarwis telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas sesuai dengan struktur organisasi. Ketua Pokdarwis bertanggung jawab dalam memimpin organisasi, menyusun kebijakan, menjalin koordinasi dengan pemerintah maupun pihak lain, serta mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan ekowisata. Wakil ketua berperan membantu koordinasi kegiatan operasional dan mendampingi berbagai program pemberdayaan masyarakat, sedangkan sekretaris bertanggung jawab terhadap administrasi organisasi, pencatatan kegiatan, penyusunan laporan, dan dokumentasi seluruh aktivitas pengelolaan. Adanya pembagian tugas tersebut memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pengurus sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia sehingga beberapa kegiatan masih mengandalkan keterlibatan aktif pengurus inti Pokdarwis.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola ekowisata berbasis komunitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti penanaman bibit mangrove, menjaga kebersihan kawasan wisata, melakukan gotong royong memperbaiki fasilitas wisata, membantu pengelolaan parkir, hingga mendukung berbagai kegiatan pelayanan kepada wisatawan. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai sumber kehidupan sekaligus aset wisata yang memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam memberikan edukasi sederhana kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak tanaman mangrove selama berada di kawasan wisata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih dilakukan secara sederhana. Setiap kegiatan maupun penggunaan dana operasional dibahas dalam forum internal Pokdarwis dan disampaikan kepada anggota ketika dilaksanakan rapat evaluasi. Sekretaris Pokdarwis

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memiliki peran penting dalam melakukan pencatatan administrasi, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program. Sistem administrasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih tertib, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas administrasi dan pendampingan agar pengelolaan organisasi menjadi lebih profesional.

Pelaksanaan kegiatan konservasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola ekowisata mangrove. Berdasarkan hasil observasi, kawasan wisata secara rutin melaksanakan kegiatan penanaman kembali mangrove, pemeliharaan tanaman yang telah tumbuh, pembersihan sampah di sekitar kawasan, serta perawatan fasilitas wisata seperti jembatan tracking dan area kunjungan. Kegiatan konservasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengurus Pokdarwis, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dan beberapa pihak yang bekerja sama dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek konservasi telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan sehingga aktivitas wisata tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi ekologis ekosistem mangrove. Dari aspek ekonomi, keberadaan Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wisatawan telah membuka peluang usaha baru, seperti penjualan makanan dan minuman, penyediaan jasa parkir, serta penjualan berbagai produk lokal kepada pengunjung. Aktivitas ekonomi tersebut mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, khususnya pada akhir pekan maupun hari libur ketika jumlah wisatawan meningkat. Selain menciptakan peluang usaha, keberadaan ekowisata juga mendorong masyarakat untuk lebih produktif dalam memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan ekowisata. Kendala tersebut antara lain keterbatasan fasilitas pendukung wisata, promosi yang belum optimal, keterbatasan pendanaan, serta masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan pariwisata. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena tidak semua warga terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata masih memerlukan dukungan yang lebih besar, baik melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan kelembagaan, maupun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta agar pengelolaan kawasan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera pada dasarnya telah mencerminkan karakteristik Community-Based Tourism**,** yaitu masyarakat menjadi aktor utama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemanfaatan hasil pengelolaan. Keterlibatan masyarakat tersebut memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kawasan wisata sehingga mendorong masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove secara bersama-sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiara Yohananis Marlina dan M. Firmansyah (2025**)** yang menyatakan bahwa tata kelola ekowisata berbasis kelembagaan lokal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan pengelola, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan mendukung konservasi lingkungan. Selain itu, temuan ini juga mendukung konsep Community-Based Tourism yang menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengelolaan. Dengan demikian, tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera dapat dikatakan telah berjalan cukup baik karena mampu mengintegrasikan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, konservasi lingkungan, dan peningkatan ekonomi lokal, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, promosi wisata, sarana-prasarana, serta dukungan kebijakan agar pengelolaan dapat berlangsung lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Penerapan Prinsip Blue Ekonomy

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *Blue Economy* dalam pengelolaan kawasan wisata. Penerapan tersebut tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersama masyarakat dalam mengelola potensi hutan mangrove secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pengelola belum secara eksplisit menggunakan istilah *Blue Economy* dalam setiap kegiatan, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik pengelolaan yang diterapkan telah mencerminkan nilai-nilai utama konsep tersebut. Pengelolaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga fungsi ekologis hutan mangrove sebagai ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Pokdarwis, pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga setiap kegiatan pembangunan selalu disesuaikan dengan kondisi ekosistem mangrove. Pengelola berupaya memanfaatkan potensi alam yang telah tersedia tanpa melakukan perubahan yang dapat merusak vegetasi mangrove maupun habitat biota pesisir. Pembangunan jalur *tracking*, gazebo, tempat beristirahat, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya dilakukan secara terbatas agar tidak mengurangi fungsi ekologis kawasan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelola berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengembangan wisata dan kelestarian lingkungan sehingga kawasan mangrove tetap mampu menjalankan fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat berbagai jenis biota, serta penyerap karbon.

Salah satu prinsip *Blue Economy* yang terlihat dalam penelitian ini adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam**.** Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan wisata tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, melainkan lebih menonjolkan keindahan alami hutan mangrove sebagai daya tarik utama wisata. Pengelola memanfaatkan ekosistem yang telah ada sebagai media edukasi lingkungan, wisata alam, dan kegiatan konservasi tanpa melakukan eksploitasi yang dapat mengurangi kualitas ekosistem. Dengan demikian, nilai ekonomi kawasan diperoleh dari jasa lingkungan (*environmental services*) yang dihasilkan oleh ekosistem mangrove, bukan dari pemanfaatan yang bersifat ekstraktif. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Blue Economy* yang menekankan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan secara efisien sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan pada masa yang akan datang.

Selain efisiensi pemanfaatan sumber daya, penerapan Blue Economy juga terlihat melalui upaya konservasi dan perlindungan ekosistem mangrove**.** Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan konservasi dilakukan secara rutin melalui penanaman kembali bibit mangrove, pemeliharaan tanaman yang telah tumbuh, pembersihan sampah di kawasan wisata, serta perawatan fasilitas yang mendukung aktivitas wisata. Masyarakat bersama pengurus Pokdarwis secara berkala melaksanakan kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga kawasan wisata tetap nyaman bagi pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan mangrove. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kondisi kawasan mangrove masih relatif terjaga, ditandai dengan masih banyaknya vegetasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mangrove yang tumbuh dengan baik serta lingkungan wisata yang cukup bersih. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan konservasi telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan kawasan, bukan sekadar kegiatan insidental yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Pengelola juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Bentuk edukasi tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung kepada pengunjung, pemasangan imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta mengajak masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak vegetasi mangrove. Edukasi lingkungan tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan hutan mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kawasan wisata sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Prinsip *Blue Economy* berikutnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya pesisir secara berkelanjutan**.** berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata, keberadaan Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera telah memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Beberapa masyarakat membuka usaha kuliner, menjual makanan ringan dan minuman, menyediakan jasa parkir, serta menawarkan berbagai produk lokal kepada wisatawan. Selain itu, sebagian masyarakat juga memperoleh tambahan pendapatan melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan kawasan wisata, baik sebagai pengurus Pokdarwis maupun sebagai tenaga yang membantu operasional kegiatan wisata.

Keberadaan ekowisata tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya pesisir. Sebelum berkembangnya kawasan wisata, sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan. Namun, setelah kawasan mangrove dikembangkan sebagai destinasi wisata, masyarakat mulai memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih beragam tanpa harus meningkatkan tekanan terhadap sumber daya pesisir. Diversifikasi mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan jasa lingkungan sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip *Blue Economy* sangat dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat terlihat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan kawasan wisata. Masyarakat secara sukarela mengikuti kegiatan penanaman mangrove, gotong royong membersihkan kawasan, memperbaiki fasilitas wisata, serta menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kawasan wisata sehingga masyarakat menyadari bahwa kelestarian mangrove merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan kegiatan wisata dan manfaat ekonomi yang mereka peroleh. Semakin baik kondisi lingkungan yang dipertahankan, semakin besar pula peluang meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke kawasan tersebut.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan prinsip Blue Economy di Kampung Nelayan Sejahtera. Kendala tersebut antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata, keterbatasan anggaran pengelolaan, promosi wisata yang belum optimal, serta masih kurangnya pelatihan mengenai pengelolaan ekowisata berbasis Blue Economy. Selain itu, belum semua masyarakat memahami konsep Blue Economy secara teoritis sehingga penerapannya lebih didasarkan pada pengalaman dan kebiasaan dalam menjaga lingkungan. Kondisi ini

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menunjukkan bahwa implementasi Blue Economy masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan kelembagaan, serta dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun penyediaan fasilitas pendukung.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera telah mengintegrasikan tiga prinsip utama Blue Economy yang menjadi fokus penelitian, yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, konservasi ekosistem mangrove, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal**.** Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk pola pengelolaan yang mengedepankan keberlanjutan. Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai objek wisata dilakukan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya, sementara manfaat ekonomi yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai peluang usaha berbasis wisata. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua aspek yang saling mendukung dalam pembangunan kawasan pesisir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep Blue Economy, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien, menghasilkan nilai tambah ekonomi, meminimalkan limbah, serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Temuan penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat mampu menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu sistem pengelolaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip Blue Economy di Kampung Nelayan Sejahtera dapat dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi pengelolaan, penguatan kelembagaan, serta sinergi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta tetap diperlukan agar implementasi Blue Economy dapat berlangsung secara lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun kelestarian ekosistem mangrove.

Perspektif Islam Dalam Tata Kelola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera tidak hanya berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga telah mengarah pada penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pengelolaannya. Nilai-nilai tersebut tercermin melalui prinsip amanah**,** tanggung jawab *(khalifah)***,** keadilan *(al-'adl)***,** kemaslahatan (maslahah)**,** serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memandang bahwa pengelolaan kawasan mangrove bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Pokdarwis, nilai-nilai keislaman telah diupayakan dalam setiap kegiatan pengelolaan ekowisata melalui penerapan kejujuran dalam pengelolaan keuangan, keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing pengurus, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan menjaga kebersihan kawasan dan pelestarian mangrove secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris I Pokdarwis yang menjelaskan bahwa nilai kejujuran diwujudkan melalui pencatatan administrasi dan penyampaian informasi secara terbuka, sedangkan tanggung jawab diwujudkan melalui pelaksanaan tugas organisasi sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, masyarakat dan pengunjung juga terus diberikan pemahaman

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mengenai pentingnya menjaga kebersihan serta melestarikan hutan mangrove sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab administratif dalam mengelola organisasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual dalam memelihara sumber daya alam yang telah dianugerahkan Allah Swt. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara terbuka, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan mencerminkan bahwa tata kelola organisasi telah berupaya menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam praktik pengelolaan sehari-hari. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam *QS. An-Nisa ayat 58,* yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dijalankan secara adil. Dalam konteks pengelolaan ekowisata, amanah diwujudkan melalui tanggung jawab pengurus dalam mengelola kawasan wisata secara transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Selain prinsip amanah, hasil penelitian juga menunjukkan adanya implementasi konsep *khalifah* dalam pengelolaan ekowisata mangrove. Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai *khalifah* di muka bumi untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga alam tanpa melakukan kerusakan. Konsep tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *QS. Al-Baqarah ayat 30,* yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pengelola bumi. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus Pokdarwis menyatakan bahwa pengelolaan kawasan mangrove selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga keberlangsungan ekosistem. Pembangunan fasilitas wisata dilakukan secara terbatas dengan tetap mempertahankan keberadaan vegetasi mangrove sehingga fungsi ekologis kawasan tidak terganggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab tanpa menghilangkan fungsi utama hutan mangrove sebagai pelindung wilayah pesisir dan habitat berbagai biota.

Hasil observasi peneliti semakin memperkuat temuan tersebut. Peneliti menemukan bahwa pengurus dan masyarakat secara rutin melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan wisata, melakukan penanaman kembali bibit mangrove, merawat fasilitas wisata, serta mengawasi kondisi lingkungan di sekitar kawasan. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa aktivitas konservasi telah menjadi bagian dari pengelolaan sehari-hari dan tidak hanya dilakukan pada saat terdapat program tertentu. Praktik tersebut mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam, yaitu bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan bersama. Dengan demikian, pengelolaan ekowisata mangrove tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga ciptaan Allah Swt.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Pokdarwis, pengelola juga menerapkan berbagai aturan untuk menjaga kelestarian kawasan mangrove, seperti larangan menebang pohon mangrove, larangan membuang sampah sembarangan, serta melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan wisata secara berkala. Kebijakan tersebut bertujuan agar aktivitas wisata tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem mangrove yang menjadi aset utama kawasan wisata. Upaya tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam *QS. Ar-Rum ayat 41,* yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan manusia. Ayat tersebut memberikan pesan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan menjaga lingkungan, bukan justru mengeksploitasinya secara berlebihan. Oleh karena itu, penerapan aturan dalam pengelolaan kawasan wisata merupakan bentuk implementasi ajaran Islam dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Perspektif Islam dalam tata kelola ekowisata juga tercermin melalui upaya mewujudkan kemaslahatan *(maslahah)* bagi masyarakat. Konsep maslahah menempatkan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan ekowisata mangrove telah membuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat melalui kegiatan wisata, seperti usaha kuliner, jasa parkir, dan penjualan produk lokal. Namun demikian, pengembangan ekonomi tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem mangrove sehingga manfaat ekonomi tidak diperoleh melalui eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam *QS. Al-Qashash ayat 77***,** yang mengajarkan agar manusia mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ayat tersebut memberikan landasan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang bekerja sebagai petugas parkir menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga mangrove mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Masyarakat memahami bahwa keberadaan mangrove tidak hanya melindungi kawasan pesisir dari abrasi, tetapi juga menjadi sumber manfaat ekonomi melalui kegiatan ekowisata. Kesadaran tersebut tercermin dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, penanaman mangrove, pemeliharaan kawasan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun demikian, informan juga menyampaikan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki tingkat kepedulian yang sama sehingga diperlukan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan kesadaran lingkungan merupakan proses yang harus terus dilakukan agar nilai-nilai Islam benar-benar menjadi budaya dalam pengelolaan kawasan wisata.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera telah mengarah pada penerapan prinsip keadilan *(al-'adl)* melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan maupun memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas wisata. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, pengelolaan kawasan, maupun menjalankan usaha di sekitar kawasan wisata. Akan tetapi, pemerataan manfaat ekonomi masih belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat karena tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata masih berbeda-beda. Oleh karena itu, pengelola perlu terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara lebih merata sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik pengelolaannya melalui penerapan prinsip amanah, tanggung jawab sebagai khalifah, keadilan, kemaslahatan, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera tidak hanya mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu telah mengarah pada penerapan Community-Based Tourism (CBT) yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan sebagai kelembagaan lokal yang mengoordinasikan pengelolaan kawasan wisata sekaligus menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi mangrove, pengelolaan fasilitas wisata, dan pengembangan usaha masyarakat. Partisipasi tersebut telah membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kawasan ekowisata sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan kawasan mangrove. Meskipun demikian, pengelolaan ekowisata masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung wisata, pendanaan, promosi, serta belum optimalnya dukungan pemerintah dan penguatan kelembagaan, sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekowisata.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Blue Economy telah diimplementasikan dalam tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera, meskipun belum secara formal dijadikan sebagai konsep utama dalam pengelolaan. Implementasi tersebut tercermin melalui pemanfaatan sumber daya mangrove secara efisien tanpa mengurangi fungsi ekologisnya, pelaksanaan kegiatan konservasi secara berkelanjutan melalui penanaman kembali mangrove, pemeliharaan kawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Selain itu, pengembangan ekowisata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui munculnya berbagai peluang usaha, seperti usaha kuliner, jasa parkir, dan penjualan produk lokal yang mampu menambah pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan ekowisata di Kampung Nelayan Sejahtera telah menunjukkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tiga prinsip utama dalam konsep Blue Economy.

Dari perspektif Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera telah mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam melalui prinsip amanah**,** tanggung jawab sebagai khalifah**,** keadilan (al-'adl)**,** kemaslahatan (maslahah)**,** serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah Swt. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pengelolaan organisasi yang mengedepankan kejujuran dan transparansi, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan kegiatan konservasi secara berkelanjutan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas ekowisata. Meskipun pemerataan manfaat ekonomi masih perlu ditingkatkan, secara umum tata kelola yang diterapkan telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), dan menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola Ekowisata Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera telah mengintegrasikan pendekatan Community-Based Tourism**,** prinsip Blue Economy**,** dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan kawasan pesisir. Integrasi ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga berupaya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove melalui partisipasi masyarakat dan penerapan nilai-nilai

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, model pengelolaan yang diterapkan memiliki potensi untuk menjadi alternatif tata kelola ekowisata mangrove berbasis komunitas yang mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual sesuai dengan konsep Blue Economy dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Eny, Latifah. "Fiqh Al-Bī'ah And The Concept Of Green And Blue Economy For Achieving Sustainable Development In The Context Of Sdgs." *Invest Journal Of Sharia & Economic Law* 4, No. 1 (2024): 74–99. Https://Doi.Org/10.21154/Invest.V4i1.7732.

Singgalen, Yerik Afrianto. "Mangrove Forest Utilization For Sustainable Livelihood Through Community-Based Ecotourism In Kao Village Of North Halmahera District." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 26, No. 2 (2020): 155–68. Https://Doi.Org/10.7226/Jtfm.26.2.155.

Emalia Zulfa, Murwiati Asih, Awaluddin Imam Purwaningsih, Vitriyani Tri. "Pengembangan Smart Tourism Ekosistem Mangrove Petengoran Untuk Memperkuat Kemandirian Masyarakat Desa Gebang Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung* 2, No. 1 (2024): 6–12.

Daniel A. Friess, Kerrylee Rogers, Catherine E. Lovelock, Ken W. Krauss, Stuart E. Hamilton, Shing Yip Lee, Richard Lucas, Jurgenne Primavera, Anusha Rajkaran, And Suhua Shi. "The State Of The World's Mangrove Forests: Past, Present, And Future." *Annual Review Of Environment And Resources* 44 (2019): 89–115. Https://Doi.Org/10.1146/Annurev-Environ-101718-033302.

Nicha Alvio, Zulkarnaini. "Kebijakan Pengembangan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan Untuk Konservasi Ekosistem Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal" 2, No. 2 (2025): 105–14.

Muhamad Efendi, Sri Juni Woro Astuti. "Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia Muhamad Efendi , Sri Juni Woro Astuti Abstrak." *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 1, No. 2 (2021): 105–35.

Hakmi, Azizul, Nurul Qomar, And Niskan Walid Masruri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Ekowisata Mangrove." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan* 9 (2025): 128–34.

Kholil, Lu'lu' Najmi. "Peran Sekretaris Dalam Mendukung Kelancaran Administrasi Perkantoran." *Jurnal Perbankan Syariah* 7, No. 2 (2014): 107–15.

Apelabi, Ana Maria Goreti Boy Jamil, Achmad Maulana Malik, And Dwi Fauzia Putra. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Sebagai Kawasan Ekowisata (Studi Kasus Dusun Magelo'o Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)." *Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 4, No. 2 (2019): 57–71.

Dewi, Yashinta Kumala, Baso Aswar, And Safrudin Alam, Jamaluddin Fitra. "Ekonomi Biru Indonesia Untuk Perikanan Berkelanjutan." *Jfmarsci* 8, No. June (2025): 47–57.

Putri, Nadia Ananda, Romi Adetio Setiawan, And Nurrahmah Putry. "Transformasi Digital Pelaku Umkm Dan Kesesuaiannya Dengan Etika Bisnis Syariah Di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 11, No. 204 (2026): 1549–58.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Sherin Meliana, Romi Adetio Setiawan, Khairiah Elwardah. "Evaluasi Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dengan Pendekatan Business Model Canvas Dalam Ihsan." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking Andfinance* 7, No. 1 (2024): 121–131.

Arsyad, Muhammad, And Noor Hasanah. "Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah Dan Amanah." *Al-Mustafid: Jurnal Of Quran And Hadith Studies* 4, No. 1 (2025): 33–48. Https://Ejournal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Mustafid.

Marzelino Arif Julyandri, Romi Adetio Setiawan, And Andi Cahyono. "Dampak Kawasan Pelabuhan Dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Baai Bengkulu Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 5, No. 1 (2025): 413–26. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V5i1.11757.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, 373.

Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2019, Qs. An-Nisa: 58. "Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019